

BALAI PENERANGAN PEMUDA INDONESIA DALAM NARASI MASA LAMPAU

Zusneli Zubir¹
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)¹
zusneli_z@yahoo.co.id¹

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengungkap pengaruh dan aktivitas di dalam gedung Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI) pada masa Kolonial Belanda, dan kisah heroiknya para pemuda dalam mempertahankan kemerdekaan. Metode penelitian menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa kolonial Belanda, gedung BPPI berfungsi sebagai ranah berhimpunnya para saudagar Vereeniging yang berbisnis di Pasar Gadang, Pasar Mudik, Pasar Batipuh, dan Pasar Malintang. Pada masa awal kemerdekaan, gedung ini berubah menjadi Balai Penerangan Pemuda Indonesia. Di tempat inilah kali pertama dikibarkan bendera merah putih, pelantikan residen pertama, pembentukan BKR, dan terbentuknya KNI Sumatera Barat. Simpulan penelitian pada 2017, Pemerintah Kota Padang memulai rencana merevitalisasi gedung yang akan difungsikan sebagai museum Gedung Joang yang nantinya akan dilengkapi dengan foto-foto, peta kota Padang tempo dulu, peta pergerakan para pemuda revolusioner dalam mempertahankan kemerdekaan.

Kata Kunci: BPPI, Kemerdekaan, Perjuangan, Saudagar

ABSTRACT

The purpose of the study was to reveal the influence and activities in the Indonesian Youth Information Center (BPPI) building during the Dutch Colonial period, and the story of the heroic youth in defending independence. The research method uses historical methods consisting of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results showed that during the Dutch colonial period, the BPPI building functioned as a gathering place for Vereeniging merchants who did business in the Gadang Market, Mudik Market, Batipuh Market, and Malintang Market. In the early days of independence, this building was turned into the Indonesian Youth Information Center. This is where the red and white flag was raised for the first time, the inauguration of the first resident, the formation of the BKR, and the formation of the KNI of West Sumatra. The conclusion of the research in 2017, the Padang City Government started a plan to revitalize the building which will function as a Joang Building museum which will later be equipped with photographs, a map of the old Padang city, a map of the movement of revolutionary youth in defending independence.

Keywords: BPPI, Independence, Merchant, Struggle.

PENDAHULUAN

Kawasan di sepanjang pantai barat Sumatera, terutama di Kota Padang kaya dengan narasi sejarah dan rekam jejaknya, berupa bangunan tua yang telah dimakan usia. Bangunan tua itu pada umumnya berasal dari masa Kolonial Belanda, dengan ciri khas gedung kokoh, pintu dan daun jendela yang tinggi.

Beberapa kawasan pasar tua, seperti Pasar Gadang, Pasar Mudik, Pasar Batipuh, dan Pasar Malintang sebelum tahun 2009, masih tetap kokoh berdiri, meskipun ada sebagian yang mengalami retak akibat guncangan gempa tahun 2007.

Namun, guncangan 30 September 2009, mengubah wajah kawasan yang kaya dengan narasi masa silam tersebut. Satu demi satu bangunan yang terletak di kawasan strategis dan pusat perekonomian di Kota Padang sejak abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20 itu, ambruk satu persatu. Hanya sisa beberapa yang masih bertahan, termasuk “Gedung Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI)” yang menjadi saksi narasi sejarah perjuangan bangsa.

Bangunan tersebut berjajar di Pasar Mudik dan Pasar Gadang yang bernilai sejarah dan sekarang dipakai sebagai Gedung Joang dulunya merupakan pusat dari *Vereeniging* (Perhimpunan Saudagar), kemudian seperti yang telah disebutkan di atas, di awal kemerdekaan menjadi Badan Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI).

Tidak hanya sebagai saksi dari peristiwa disembarkannya berita proklamasi oleh para saudagar dan pemuda revolusioner, Gedung BPPI

turut hadir menjadi bagian dari rekam jejak dilantiknya residen pertama Sumatra Barat, yakni Moh. Sjafei, serta dilantiknya anggota dari Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Sumatra Barat (Sufyan, 2021).

Nilai kesejarahan gedung yang berada di Jalan Pasar Mudik No. 50 Kota Padang itu, tentu mudah ditemukan dalam literatur, mulai dari terbitan masa Kolonial Belanda, masa revolusi kemerdekaan hingga kini. Fakta ini bisa ditemukan, ketika penulis sejarah mengisahkan situasi perekonomian dan pasar pada masa kolonial Belanda, ataupun heroiknya para pemuda revolusioner dalam mempertahankan kemerdekaan.

Narasi mengenai Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI) masih sedikit yang menyentuhnya, dalam perspektif sejarah. Dan tulisan itu, umumnya hanya menjadi bagian kecil saja untuk BPPI. Handayani (2021) dalam “*Hesbollah Kuranji at The Front Area Padang (1945-1948)*” menjelaskan, perjuangan Lasykar Hizbullah Kota Padang yang dilandasi niat “*Jihad Fii Sabillillah*” berjuang menegakkan Negara dan Agama sematamata hanya karena Allah. Lasykar Hizbullah ini, menurut penulis mempunyai ketegasan pendirian bahwa segala kekacauan dan gangguan terhadap ketertiban masyarakat yang terjadi di Kota Padang adalah tanggung jawab semua lapisan masyarakat yang berada di Kota Padang (Handayani, 2021). Namun, dalam artikelnya penulis tidak menyinggung mengenai BPPI.

Maiza Elvira (2019) dalam “Bandit-bandit Revolusi: Kekerasan Terhadap Rakyat Sipil Selama Perang di Sumatera Barat 1945-1949” menjelaskan, pasca kemerdekaan Indonesia diproklamkan tahun 1945, di Sumatera Barat ketegangan mulai terasa seiring dengan munculnya kelompok pro dan kontra republik. Kelompok pro republik mulai melakukan operasi *sweeping* di beberapa wilayah basis Eropa di Sumatera Barat, seperti Padang, Sawahlunto, dan Bukittinggi. Aksi teror oleh kelompok liar bersenjata yang menamai dirinya kelompok republikeun tersebut melakukan penjarahan, dan sebelum mereka membakar rumahrumah. Perempuan bahkan diculik; diperkosa dan kemudian dibunuh. Aksi bandit-bandit tersebut seolah dibiarkan, karena dilakukan atas dasar tujuan Revolusi (Elvira, 2019). Namun, dalam tulisannya, Maiza sedikit saja membahas mengenai BPPI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, analisis sintesis (interpretasi), dan penulisan.

Tahap pertama, adalah heuristik. Heuristik merupakan tahap pencarian dan pengumpulan sumber-sumber sejarah. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber tertulis, meliputi: arsip, baik yang diproduksi oleh pemerintah kolonial Belanda maupun pemerintah Indonesia. Sumber tersebut terdapat di Arsip Nasional, Perpustakaan DHD 45 Sumatra Barat, serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Propinsi

Sumatera Barat. Data arsip yang di dapat berupa data penduduk, arsip kolonial Belanda, maupun arsip pribadi yang masih disimpan oleh perorangan. Sumber lain yang dapat digunakan adalah surat kabar yang terbit pada masa pemerintahan kolonial Belanda, dan masa setelah Indonesia merdeka.

Tahap kedua, adalah kritik sumber, yang dapat dibagi atas kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern dilakukan untuk mencari otentisitas arsip dan dokumen yang sudah didapatkan. Kritik intern dilakukan terhadap isi dokumen yang otentik tersebut untuk mendapat kevalidan data yang dikandungnya. Informasi yang ditemukan, dilakukan *cross check* dengan informasi pada sumber lainnya, sehingga validitas informasi yang diberikan dapat teruji.

Tahap ketiga adalah analisis dan sintesis data (interpretasi). Fakta yang diperoleh, baik dari sumber tertulis maupun sumber lisan dianalisis dengan menggunakan analisis prosesual dan struktural Analisis prosesual digunakan guna menemukan kembali awal muncul dan peran Gedung BPPI dalam pusaran sejarah. Selain itu, dalam analisis ini juga dipakai melihat keberahanan gedung BPPI pasca kemerdekaan. Analisis struktural digunakan untuk menganalisis kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terhadap keberadaan bangunan BPPI di Kota Padang.

Tahap keempat yaitu tahap penulisan (historiografi). Penulisan berbentuk sejarah institusi dengan objek penelitian gedung BPPI. Model yang digunakan adalah penulisan model evolusi untuk

melukiskan perkembangan sebuah masyarakat yang kompleks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Bangunan Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI) bermula dari perkumpulan Saudagar (Saudagar Vereeniging) di awal abad ke-20. Bangunan yang berlokasi di Pasar Mudik Kota Padang itu, menjadi saksi dari peristiwa bersejarah, mulai dari masa pergerakan kebangsaan sampai di tahun 1950an.

Kawasan Pasar Gadang menjadi bagian utama dari beberapa pasar lain yang hadir sejak masa Kolonial Belanda dimana saudagarnya berasal dari pedalaman Minangkabau, seperti Sumpur, Kumango, Silungkang, Koto Anau, dan lainnya.

Pasar Gadang, Pasar Mudik, Pasar Batipuh, Pasar Malintang menjadi kompetitor dari Pasar Tanah Kongsy yang dihuni oleh etnis Tionghoa. Memasuki masa kemerdekaan, kawasan ini menjelma menjadi pelopor penyebar berita proklamasi kemerdekaan, dikukuhkannya residen pertama Sumatra Barat, dilantiknya anggota Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Sumatra Barat.

PEMBAHASAN

**Saudagar Vereeniging:
Berhimpunnya Saudagar
Penggerak Semangat Kebangsaan
dan Islam Modernis**

Jauh sebelum kemerdekaan, kawasan kwartet pasar di Kota Padang, yakni Pasar Gadang, Pasar Mudik, Pasar Batipuh, dan Pasar Malintang merupakan sentra perekonomian—yang secara langsung

menjadi rivalitas dari keberadaan pasar Tanah Kongsy yang didiami etnis Tionghoa.

Dari kawasan ini, nanti muncul para saudagar yang berasal dari pedalaman Minangkabau, dan pesisir pantai Barat Sumatera. Beberapa nama saudagar yang terukir dalam catatan emas di masa itu, di antaranya: Abdullah Basa Bandaro, Sulaiman, Oemar Marah Alamsyah, Marzuki Yatim, Turki Bagindo Marah, Mr. Sutan Harun alRasjid, Abdul Aziz Latif H.M Thaib, Buyung Tamin, A. Fatah Sutan Malano, M. Thaib Sutan Mangkuto, A. Karim Yusuf, Dt. Madjo Kayo, dan lainnya (Zubir, 2016).

Bisnis yang mereka geluti pada umumnya adalah ekspor impor komoditi unggulan, travel perjalanan, biro haji, dan lainnya. Mudah-mudahan lalu lintas perdagangan dari Pasar Gadang menuju pesisir Barat, maupun ke pedalaman tidak saja disebabkan lancarnya aksesibilitas jalan darat yang dibangun pemerintah Kolonial Belanda, namun juga hadirnya transportasi massal yang ikut mendorong mobilitas manusia, dan barang dalam skala yang lebih besar (Furnivall, 1948).

Keberhasilan para saudagar ini membangun jejaring bisnis, juga berelasi dengan aktivitas mereka di dunia pergerakan. Sebut saja nama saudagar Pasar Gadang Abdullah Basa Bandaro, ayah angkat dari Chatib Sulaiman yang aktif di dunia pergerakan (Sufyan, 2018). Saudagar kaya yang turut mensponsori lahirnya Sarekat Oesaha, juga disebut-sebut mendanai beberapa surat kabar yang berhaluan Islam, nasionalis, bahkan juga Komunis (Sufyan, 2021).

Selain nama Abdulah Basa Bandaro, saudagar lainnya yang turut berperan pada masa pergerakan nasional adalah Abdul Aziz Latif. Selain berperan dalam *Saudagar Vereeniging*, Abdul Latif berpengaruh dalam usaha mendorong nasionalisme modern dan menggerakkan modernisasi Islam di Sumatera Barat.

Seperti Muhammad Thaher Marah Sutan yang mendirikan *Sarekat Oesaha*, Abdul Latif juga berperan aktif dalam membantu *Kaum Muda* menyebarkan paham modernisasi Islam di Sumatera Barat. Familiarnya nama Abdul Latif di kalangan *Kaum Muda* sudah dimulai sejak persahabatannya dengan Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi.

Hamka menulis, setelah Abdul Latif menunaikan ibadah haji tahun 1905, memberi bantuan finansial pada *Kaum Muda* (Hamka, 1958). Beberapa kegiatan yang pernah dibantunya secara finansial antara lain menulis *Al Munir*, membantu pembiayaan Madrasah Adabiah pimpinan Haji Abdullah Ahmad, Diniyah School pimpinan Zainuddin Labay El Yunussi, Normal Islam School, sekolah Muhammadiyah, dan beberapa masjid di Sumatera Barat (Zubir, 2016). Tidak hanya sebatas itu, melalui travel Kongsi Tiganya Abdul Latif menggratiskan biaya perjalanan ibadah haji ulama-ulama modernis Islam tersebut.

Tidak hanya Hamka, menulis peranan Abdul Latif pada masa pergerakan, juga Kementerian Penerangan mencatat Abdul Latif dalam membantu secara finansial untuk sekolah (Kementerian Penerangan, 1953). Misalnya, *Islamic College*, Persatuan Guru

Agama Islam (PGAI), dan rumah yatim Normal Islam. Usaha Abdul Latif mendorong pendidikan dan modernisasi Islam tidak hanya dilakukan di beberapa kawasan di Sumatera Barat (Zubir, 2016).

Untuk menjaga aliansi dan kekuatan mereka, para saudagar tersebut membentuk sebuah perkumpulan yang mereka namakan *Saudagar Vereeniging* tahun 1916. Perkumpulan saudagar yang awalnya diketuai Nurdin Saleh merupakan salah satu dari perkumpulan saudagar di Indonesia yang bertujuan untuk melawan monopoli perdagangan Cina.



Gambar 1. Pengurus *Saudagar Vereeniging*: (dari kiri ke kanan): A. Fatah Sutan Malano (Comissaris), A. Karim Yusuf (Comissaris), Abdul Aziz Latif (Peningmeester/ bendahara), Marzuki Yatim (Vice Voorzitter), Mr. Sutan Harun Al Rasjid (Hoofdcomissaris), Turki Bagindo Marah (Voorzitter), Oemar Marah Alamsyah (Secretaris), M. Thaib Sutan Mangkuto (Comissaris), Datuk Madjo Kayo (Comissaris), H. M. Thaib (Comissaris). (Sumber: Koleksi Keluarga Zusneli Zubir).

Saudagar Vereeniging pada masa itu berpusat di Pasar Gadang Padang yang membawahi rantingranting organisasi meliputi Pasar Ilir, Pasar Mudik, Pasar Batipuh, dan Pasar Malintang

(Kementerian Penerangan, 1953). Dari pasar-pasar inilah para saudagar pesisir Barat Sumatera itu melaksanakan aktivitas bisnis dan pada periode berikutnya perkumpulan saudagar ini memperjuangkan nama persaudagaran di tingkat Nasional.



Gambar 2. Pengurus *Saudagar Vereeniging*: (duduk dari kiri ke kanan): Oemar Marah Alamsyah, Marzuki Yatim, Turki Bagindo Marah, Mr. Sutan Harun alRasjid dan Abdul Aziz Latif (berdiri dari kiri ke kanan): H.M Thaib, Buyung Tamin, A. Fatah Sutan Malano, M. Thaib Sutan Mangkuto, A. Karim Yusuf, dan Dt. Madjo Kayo. (Sumber: Koleksi keluarga Zusneli Zubir).

Selain itu, *Saudagar Vereeniging* ikut mensugesti saudagar-saudagar membentuk perusahaan besar yang bergerak di bidang ekspor impor. Menurut catatan Kementerian Penerangan, pada masa 1920an hingga tahun 1953 di Pasar Gadang bermunculan perusahaan dagang besar, seperti Firma Marah Taharuddin (eksportir), Firma Sjakur Munaf (importir), Firma B. Datuk Madjo Kajo (importir), Firma Abdul Fatah Sutan Melano (importir), N.V Sridharma, dan N.V Abdul Latif (pabrik tekstil, importir).

Pada tahun 1929 perkumpulan *Saudagar Vereeniging* berganti nama menjadi Himpunan Saudagar Indonesia diketuai Taher Marah Sutan (Kebudayaan Minangkabau, 1974). Namun enam tahun kemudian, tepatnya tahun 1935 perkumpulan dagang ini kembali dengan nama *Saudagar Vereeniging*. Pada tahun 1941 dilaksanakan kongres untuk memilih pengurus perkumpulan saudagar periode 1941-1943. Pada masa itu terpilih Mr. Sutan Harun alRasjid (hoofdcomissaris), Abdul Aziz Latif (Penningmeester/ bendahara), Marzuki Yatim (Vice voorzitter), Turki Bagindo Marah (voorzitter), dan Oemar Marah Alamsyah (secretaris).

Dari BPPI: Menggelorakan Semangat Revolusi Fisik

Sesuai dengan namanya, eks gedung BPPI menjadi saksi bisu pembentukan organisasi Badan Penerangan Pemuda Indonesia pada 21 Agustus 1945. Di gedung ini lah di awal kemerdekaan, Sang Saka Merah Putih untuk kali pertama berkibar (Zed, 1982).

Kisah lahirnya nama BPPI bermula dari gagasan Ismael Lengah. Dalam draft manuskripnya, Lengah mengisahkan ada tiga pemikiran, Lengah dalam menggagas badan tersebut di awal kemerdekaan. Ketiga pemikiran ini, diungkap oleh Lengah di hadapan saudagar Abdullah Basa Bandaro, Abdul Aziz Latif, dan Chatib Sulaiman di Pasar Mudik (Lengah, 1973).

Pertama, perlunya dibentuk sebuah badan sebagai wadah perjuangan. Ia mengusulkan pada Sjafei untuk membentuk Balai

Penerangan Pemuda Indonesia. Badan ini, menurutnya bertugas memberi penjelasan kepada pihak yang bertanya mengenai proklamasi dan perjuangan untuk mendukung penegasan kemerdekaan itu. Lengah menegaskan, bahwa badan ini harus menjelma menjadi pemerintahan sementara, sambil menunggu terbentuknya pemerintahan permanen.



Gambar 3. Dari kanan Kolonel Dahlan Jambek, Letnan Kolonel Jazid Abidin dan Letnan Kolonel Ismael Lengah, Komandan Resimen III Divisi III. (Sumber: [Repro dari id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Tiga_Perwira](https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Tiga_Perwira)).

Kedua, pembentukan kekuatan fisik sebagai tulang punggung BPPI. Lengah kemudian mengusulkan berdirinya Badan Keamanan Rakyat (BKR). Bukan sekadar untuk satuan pengamanan, BKR juga diharapkan mampu menghadapi kekuatan luar yang mampu menghancurkan kedaulatan Republik Indonesia.

Ketiga, sebelum terbentuknya BPPI harus disiapkan kader-kader perjuangan yang memiliki semangat militer. Lengah pun mengusulkan berdirinya lembaga pendidikan perwira. Karena ia berpikiran, Gyugun sebagai warisan dari Jepang belum cukup mampu dan memadai, ketika ancaman dari luar kembali hadir di Indonesia.

Ketiga pemikiran dari Lengah tersebut pada dasarnya adalah menjadikan BPPI sebagai wadah untuk menggerakkan dan memimpin perjuangan dan didukung dengan kekuatan militer. Setelah berunding dengan ketiga tokoh tersebut, Lengah pun segera menghubungi pemuka masyarakat yang berada di sekitar Kota Padang.

Pada 19 Agustus 1945 diadakan rapat di gedung Persatuan Dagang Indonesia (PERSDI) yang berlokasi di Pasar Mudik. Eks gedung Saudagar *Vereeniging* ini yang kelak beralih nama menjadi Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI) (Haluan, 12 Agustus 1976).

Pertemuan yang dihadiri limapuluh orang itu, dicanangkan kepengurusan dari BPPI. Berikut susunan struktur BPPI (Kementerian Penerangan, 1953)

Ketua I	: Ismail Lengah
Ketua II	: Soeleiman
Setia usaha	: Nasroen AS, Jahja Djalil
Bendahara	: Dahlan J. Sutan Mangkuto
Perbekalan	: Iljas Jakoeb
Keamanan	: Boerhanoeddin
Kesehatan	: dr. Nazaruddin
Penerangan	: Rusdi
Koordinator Umum	: Kasim Dt. Malilit Alam.
Perhubungan	: Sjarif Usman, Bgd. Azizchan, Chatib Sulaiman, Mr. Nazaruddin.
Pembantu	: Djamaluddin, Muchtar Taib, Jaziz Abidin, H.Hasan, Sjarif Gani, Bgd. Taha, dan Mahjoeddin Tonex.

Pada hari yang sama dengan rapat BPPI, Ismael Lengah cs mengadakan rapat di Padang. Rapat itu merekomendasikan, sesegera mungkin dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) di daerah-daerah (Zed, 1997). Pada tanggal 5 Oktober 1945 Presiden Soekarno mengeluarkan perintah berdirinya Tentara Keamanan Rakyat yang dulunya bernama Badan keamanan Rakyat.

Akhir bulan Oktober 1945, AK.Gani ditunjuk sebagai koordinator TKR di Sumatera. Kemudian ia menunjuk mantan kepala polisi Lampung Suhardjo Hardjowardojo sebagai komandan TKR Sumatera yang terdiri dari enam divisi.



Gambar 4. Gedung Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI) yang menjadi saksi bisu awal kemerdekaan Indonesia di Sumatra Barat. (Sumber: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsumbar/retakpanjanggedungjoangbppi45padang/>)

Setelah lahirnya BKR, tanggal 31 Agustus 1945 terbentuklah Komite Nasional Indonesia (KNI) Sumatra Barat di rumah A. Muluk yang berada di Alang Lawas Padang (Husein, 1992). Pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI) tersebut dilakukan dalam sebuah komisi yang dipimpin oleh Moh.

Sjafei dengan anggota antara lain, Mr. S.M Rasjid, Arif Dt. Madjo Urang dan Dr. M. Djamil.

Dalam strukturnya pengurus KNI terdiri dari beragam profesi, mulai dari elit politik, aktivis pemuda, Giyugun dan *Heiho*. Dan, Chatib ditunjuk untuk mengurus Badan Penolong Keluarga Korban Perang (Zed, 2002).



Gambar 5. Moh Sjafeiresiden pertama Sumatera Barat, juga selaku pimpinan dari INS Kayu Tanam. Sebelum terpilih, tanggal 31 Agustus 1945, Sjafei terpilih selaku ketua KNI Sumatera Barat. (Sumber: <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=567619>)

Berikut susunan Pengurus KNI Sumatera Barat 1945-1946:

Ketua : Moh. Sjafei
Ketua Muda I : Roesad Dt. Perpatih Baringek
Ketua Muda II : dr. M. Djamil
Setia usaha bagian Persatuan dan Pendidikan : Mr. Sutan Moh. Rasjid Sa'aduddin Djabat

Badan Penolong Keluarga Korban
Perang : Chatib Sulaiman
A.Wahab Amin
Dr. Nazaruddin
Burhanuddin
Keamanan Rakyat : Ismael Lengah
Ahmaddin Dt. Barbangso
Raden Sulaiman
Kesejahteraan Rakyat : Dt. Madjo
Urang
Marah Alamsjah
Dt. Athos Ausri
Kaum Ibu dan Keputrian: Ny. Dt.
Tumanggung
Sjamsidar Jahja
Zubaedah Munaf
Hafifah Landjunin
Mr. Nazaruddin



Gambar 6. Chatib Sulaiman, selaku Wakil Ketua BPPI. Pada tanggal 31 Agustus 1945 terpilih dalam KNI Sumatera Barat dengan posisi selaku Ketua Badan Penolong Keluarga Perang (Sumber: Direproduksi dari Sufyan, 2018).

Dalam rapat BPPI September 1945, mereka memutuskan Moh. Sjafei diangkat sebagai Residen Sumatra Barat, meskipun nantinya

jabatan itu segera dilepas dua bulan kemudian, yakni tanggal 1 Oktober - 15 November 1945.

Sebagai seorang pendidik, dan bukan politisi, Moh. Sjafei tidak sanggup menghadapi ketegangan yang mencabikcabik Sumatra Barat. Pada tanggal 15 November 1945, ia pun meletakkan jabatan dan kembali mengajar di INS Kayu Tanam.

Pasca peletakkan jabatan, Sjafei meminta kepada KNI Sumatra Barat, agar memilih Roesad Dt.Perpatih Baringek, namun permintaan itu tidak ditolak mengingat Roesad pada masa pergerakan pernah menjadi Wedana dalam *Politische Indische Dienst* (PID). Namun, dikalangan sebagian anggota KNI yang berpandangan pragmatis, pengalaman Roesad selama menjadi adminisrator merupakan satusatunya hal yang mengantar Roesad sebagai residen Sumatra Barat kedua pada akhir November 1945.

Namun, lagilagi terjadi. Roesad mengundurkan diri pada Maret 1946 dengan alasan, ia tidak mampu mempertahankan masa jabatannya. Ia dianggap gagal memperbaiki kondisi ekonomi Sumatra Barat yang moratmarit (Amiruddin, 1957).

Pada Maret 1946, kembali KNI menggelar pemilihan untuk residen Sumatra Barat yang ketiga, dan terpilihlah Mr. Sutan Moh. Rasjid. Namun karena kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan, Rasjid menyatakan mengundurkan diri.

KNI Sumatra Barat kemudian memilih dr.Moh Djamil sebagai residen ketiga Sumatra Barat sampai bulan Juni 1946. Sampai akhirnya Rasjid menggantikan posisinya sebagai residen keempat (Enar, 1987).

Proses penetapan Sjafei pun tergolong unik. Jahja Djalil pernah meminta kesediaan Chatib menerima jabatan Residen tanggal 22 Agustus 1945. Sjafei belum berani menerima jabatan itu, sebelum ia meminta pertimbangan Chatib Sulaiman dan Anwar Sutan Saidi di Bukittinggi (Sufyan, 2018).



Gambar 7. dr. Moh. Djamil terpilih sebagai Residen kedua Sumatera Barat,, menggantikan Moh. Sjafei. (Sumber: <https://langgam.id/mohammad-djamil-dokter-pejuang-memimpin-sumatra-tengah-di-masa-sulit/>).

Setelah Sjafei terpilih sebagai Residen Sumatera Barat, posisi ketua KNI Sumatera Barat digantikan oleh dr. Moh. Djamil ditambah jumlah personil yang baru. Berikut susunan strukturnya.

Ketua : dr. Moh. Djamil
Ketua Muda I : Mr. Sutan Moh. Rasjid.
Ketua Muda II : Mr. Nasroen
Dewan Harian : Bachtaruddin Sjarif Usman
Darwis Thaib
Usman Keadilan

Abdullah Kamil
Chatib Suleiman
Saalah Jusuf Sutan Mangkuto
Anggota : 97 orang



Gambar 8 Saalah Jusuf Sutan Mangkuto selaku anggota Dewan Harian KNI Sumatera Barat. (Sumber: Direproduksi dari <https://padang.tribunnews.com/2019/10/02/sejarah-saalah-yusuf-sutan-mangkuto-perintis-islam-berkemajuan-dari-sumatera-barat>)

Ada yang berbeda dengan susunan KNI Sumatera Barat pimpinan Djamil dengan pendahulunya. Bila pada masa kepemimpinan Sjafei anggota KNI hanya berjumlah 20 orang, masa Djamil berjumlah 107 orang yang terdiri dari: golongan pamong praja, kepolisian, pegawai, serikat sekerja, badan koperasi, parpol, kaum adat, golongan agama, badan perekonomian, kaum ibu, kaum tani, guru, kaum perempuan, pelaut, pemuda, pekerja Ombilin (baca: Perusahaan Negara Tambang Batubara Ombilin, atau PN.TBO),

dan 40 orang berasal dari utusan tiap kewedanaan (Sufyan, 2018b).

Dua bulan pasca terbentuknya BPPI, tanggal 3 November 1945 Wakil Presiden Moh. Hatta menyerukan pembentukan partai politik. Seruan Hatta, segera disambut pro kontra di kalangan elite politik. Tan Malaka yang sebulan sebelumnya bertemu Bung Karno dan Bung Hatta, menentang putusan Hatta yang cenderung terburuburu mengeluarkan Maklumat No. X tahun 1945.

Pada bulan September 1945 Tan Malaka bertemu Soekarno dan Moh. Hatta dalam dua kali tatap muka. Satu di antaranya, Bung Karno menandatangani surat wasiat politik yang menyatakan, “Kepemimpinan revolusi akan dilanjutkan oleh Tan Malaka, Sjahrir, dan pemimpin lain seandainya Soekarno dan Hatta tidak menjalankan pemerintahan.” (Anderson, 2008).

Dalam narasi selanjutnya, eks gedung BPPI menjadi lokus dari Penerangan Umum—yang ditujukan untuk menghindari intervensi Sekutu. Menyusul kedatangan NICA pada Oktober 1945 di Kota Padang, gedung BPPI langsung digeledah. Para pemuda revolusioner itu, kemudian ditangkap. Satu di antaranya menimpa Wakil Ketua BPPI, Chatib Sulaiman.

Pada 29 November 1945, yang ditandai dengan screening tentara Sekutu, pemudapemuda revolusioner yang acapkali berkumpul di Sahir gedung BPPI, kembali berpencar. Mereka merasakan, lebih baik menghindarkan diri dan menyusun strategi untuk berkonfrontasi dengan Sekutu di luar gedung bersejarah itu.

Kondisi Gedung Joang BPPI

Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatra Barat, telah menetapkan eks gedung BPPI ini sebagai bagian dari cagar budaya. Pada tahun 2009, tatkala Kota Padang diguncang gempa 7,8 SR, gedung mengalami kerusakan cukup parah (Sufyan, 2018).

Dinding yang dulunya kokoh, karena tidak kuat menahan guncangan gempa pun tampak retak-retak dan menyisakan bongkahan besar di sebagian kecil lantainya. Gedung hampir mengalami kerusakan sekitar 50%. Belum termasuk atapnya juga mengalami kerusakan, dan sebagian langit-langit ambruk.

Gedung yang kini dihuni Dewan Harian Cabang (DHC) 45 Kota Padang itu, terdiri dari dua lantai. Atapnya terbuat dari seng berbentuk pelana kuda. Pintu masuknya di lantai satu ada dua buah. Untuk bagian dalam, lantai ruangan terbuat dari ubin tegel polos berwarna abu-abu.

Bila ingin naik ke lantai dua, terdapat dua tangga di sudut kiri dan kanan. Tangga tersebut berbahan kayu, berlantai semen dan di keramik. Sementara di lantai dua, terdapat ruangan berlantai papan kayu. Jauh, sebelum bencana 30 September 2009, lantai dua itu difungsikan sebagai aula dan dijadikan sebagai tempat pertemuan.

SIMPULAN

Gedung Joang BPPI yang terletak di kawasan Pasar Mudik, tepatnya merupakan bagian dari narasi sejarah baik ditingkat lokal, maupun Nasional. Gedung tua yang masih kokoh ini menjadi saksi dari

periode sejarah mulai dari masa Kolonial Belanda hingga memasuki masa reformasi.

Pada 2017, Pemerintah Kota Padang memulai rencana merevitalisasi gedung. Menurut rencana, gedung akan difungsikan sebagai museum. Bila museum ini ingin diwujudkan dan menjadi bagian dari kunjungan tentu menjadi PR besar terutama dalam membenahi bangunan fisik, termasuk dalam hal ini koleksi yang dimilikinya.

Tentunya, kehadiran museum Gedung Joang ini nantinya, tidak saja dilengkapi dengan foto-foto, peta kota Padang tempo dulu, peta pergerakan para pemuda revolusioner dalam mempertahankan kemerdekaan, namun juga koleksi literatur yang bersumber dari hasil riset perjuangan di Kota Padang, maupun Gedung Joang BPPI itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, A. (1957). *Sejarah Perjuangan Harimau Kuranji 1945-1950 di Sumatra Tengah*. Sri Dharma NV.
- Anderson, B. (2008). *Imagined Communities*. INSIST PRESS. Yogyakarta
- Elvira, M. (2019). *Bandit-bandit Revolusi: Kekerasan Terhadap Rakyat Sipil Selama Perang di Sumatera Barat 1945-1949*. AL Qalam: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaa. 25(3), 583–590.
<http://dx.doi.org/10.31969/alq.v25i3.794>
- Enar, F. (1987). *Sumatra Barat 1945-1949. Pemuda Sumatra Barat*. Padang
- Furnivall, J. (1948). *Netherlands Indies: A Study of Plural Economy*. Cambridge University Press. Cambridge
- Gotschalk, L. (1950). *Understanding History*. Alfred A. Knopf.
- Hamka, H. (1958). *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera*. Widjaja. Jakarta
- Handayani, R. (2021). *Hesbollah Kuranji at the Front Padang Area (1945-1948)*. *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*. 5(1). 85-98.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30983/it.v5i1.4275>
- Husein, A. D. (1992). *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Minangkabau/Riau 1945-1950*. (2nd ed). Badan Pemurnian Sejarah Indonesia Minangkabau (BPSIM). Jakarta
- Kartodirdjo, S. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dan Metodologi Sejarah*. Gramedia. Jakarta
- Kuntowijoyo, K. (2003). *Metodologi Sejarah*. Tiara Wacana. Yogyakarta
- Kuntowijoyo, K. (2008). *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)*. Tiara Wacana. Yogyakarta
- Lengah, I. (1973). "Cerita Untuk Anak Cucu. Keikutsertaan dalam Perang Kemerdekaan", *Manuskrip*.
- Lloyd, C. (1993). *The Structure of History*. Blackwell.
- Kebudayaan Minangkabau. (1974). *Minangkabau: Majalah Kebudayaan*. Yayasan Kebudayaan Minangkabau. Jakarta

- Kebudayaan Penerangan. (1953).
Propinsi Sumatera Tengah.
Kementerian Penerangan.
Jakarta
- Sufyan, F. H. (2018). Hikmah dan Aksi Gempa 2009. Padang: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang. Padang.
- Sufyan, F. H. (2018). Sang Republikan. Biograafi Chatib Sulaiman. (2nd ed). Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang. Padang
- Sufyan, F. H. (2021). Biografi Samik Ibrahim. Jejak Langkah Saudagar, Perintis Muhammadiyah, dan Angkatan Laut. (1st ed). UMSB Press. Padang
- Sufyan, F. H. (2021). Gejolak Sosial di Sumatra Barat. Islam Modernis dan Komunis 1915-1930. Kendi. Yogyakarta
- Zed, M. (1997). *Somewhere in The Jungle*. Pemerintah Darurat Republik Indonesia: Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta
- Zed, M. (2002). Sejarah Perjuangan Kemerdekaan 1945-1949 di Kota Padang dan Sekitarnya. Yayasan Citra Budaya Indonesia. Padang
- Zubir, Z. (2016). Abdul Latif: *The Forgotten Merchant of The Western Coast of Sumatra*,". Proceedings of the 2nd SULE-IC 2016. 1403–1411. <http://conference.unsri.ac.id/index.php/sule/article/view/107/pdf>